

Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi

Sahala Purba, SE, M.Si

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

Sahalapurba12@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Application of Income Accounting Systems to Regional Original Revenue in the Financial Management Agency, Regional Revenue and Assets of Tebing Tinggi City. Data collected in the form of secondary data obtained from the sources of other parties in the company, which have been processed and relevant to this research, such as a general overview of the company including history, replacement of Revenue Service, and Functional Position and information on the implementation of income accounting systems at Locally-generated revenue. This research analysis method uses qualitative data methods to collect and present data, analyze and develop theories. The results of this study explain that the decreasing efficiency and effectiveness of Tebing Tinggi City Government in managing and utilizing regional potential and used to improve community welfare and not optimal coordination between work units, and show that the Income Accounting System applied to Regional Original Income in BPKPAD Tebing Tinggi City not yet good in 2013 - 2016, where there are imperfections in the records made by the Receiving Treasurer for all receipts to the SIMDA application.

Keywords: *Income Accounting System, Local Revenue*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Tebing Tinggi sebagai objek penelitian penulis di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah yang melihat penerapan sistem akuntansi yang telah diterapkan pada pendapatan, salah satunya pendapatan asli daerah tersebut yang diperoleh sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Sistem akuntansi pendapatan di Kota Tebing Tinggi, dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan asli tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain – Lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah yang dikelola pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah sangat bervariasi yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah serta mendorong untuk mengembangkan potensinya dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat berperan.

BPKPAD Pemerintahan Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu pelaksana kegiatan ekonomi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang mempertimbangkan sistem akuntansi yang telah diterapkan dalam pemerintahan Kota Tebing Tinggi supaya terhindar dari penyimpangan – penyimpangan atau kesalahan – kesalahan, yaitu kesalahan dalam pencatatan, pengindentifikasian ataupun dalam pelaporan, sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat merugikan Badan Pemerintahan atau pihak – pihak lain. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk membuat suatu perencanaan yang strategis dalam kebijakan – kebijakan serta program – program sebagai keterampilan yang strategis yang memiliki kompetensi, kemampuan, inovatif dalam melaksanakan pekerjaan yang optimis sehingga dapat adaptif dengan visi dan misi yang direncanakan bersama.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami sistem akuntansi Pendapatan Asli Daerah baik dalam prosedur yang dilakukan beserta pencatatannya di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di kota Tebing Tinggi. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: **"Kurangnya penerapan**

sistem akuntansi pendapatan mempengaruhi keterlambatan penyusunan laporan keuangan di BPKPAD Kota Tebing Tinggi”

1.3 Pembatasan Masalah

Dari Identifikasi masalah yang diutarakan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendapatan diteliti oleh penulis dalam PAD adalah pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah
2. Tempat yang diteliti dilakukan oleh peneliti di BPKPAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013 – 2016.

1.4 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, perlu diketahui sistem akuntansi pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan daerah yang dapat menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dengan mutu dapat diandalkan yang diperlukan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : **“Apakah Sistem Akuntansi Pendapatan telah Diterapkan Terhadap PAD di BPKPAD Kota Tebing Tinggi?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan masalah yang telah dikemukakan di atas maka adapun tujuan penulisan sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Terhadap PAD di BPKPAD Kota Tebing Tinggi.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Wiratna (2015:3) Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah berdasar kas basis dan berdasarkan basis kas menuju akrual basis serta Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi pemerintahan berdasarkan akrual basis, sedangkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

2.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konversi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi – fungsi akuntansi, baik di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah). Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah suatu instrumen untuk mengoperasikan prinsip – prinsip akuntansi yang telah ditetapkan

Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses memverifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip – prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat – alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laproan keuangan itu sendiri.

2.5 Bagan Akun Standar (BAS)

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

2.6 Hubungan Antara SAP, Kebijakan Akuntansi, dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada SAP. SAP memberikan pilihan – pilihan dalam prinsip akuntansi untuk diterapkan dalam proses akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan pilihan sesuai dengan atas prinsip – prinsip akuntansi yang telah diatur dalam SAP sesuai kepentingannya kedalam Kebijakan Akuntansi untuk dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas kepada para pengguna. Proses pengumpulan data transaksi sampai dengan disajikan dalam laporan keuangan melalui suatu proses yang terstruktur diatur dalam suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (yang didalamnya termasuk pilihan Bagan Akun Standar yang digunakan).

2.7 Akuntansi Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 (Erlina 2015:109) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktifitas normal

entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yakni pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan LRA adalah pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk penyusunan Laporan realisasi Anggaran dan juga merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan LO adalah pendapatan berbasis akrual yang digunakan untuk penyusunan Laporan Operasional.

2.8 Klasifikasi Pendapatan

Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara dalam PP No. 71 Tahun 2010, dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan Transfer
4. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.9 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui diperoleh (*earned*) dan sudah direalisasikan/dapat direalisasikan (*realized /realizable*). Diperoleh (*earned*), yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya.

Pendapatan LRA diakui ketika pendapatan tersebut diterima di rekening umum negara/daerah. Dengan kata lain, pendapatan diterima ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut.

Sedangkan pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi

2.10 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dalam hal nilai atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar.

Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto.

Pendapatan LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima

2.11 Sistem Akuntansi Pendapatan

Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan – perkiraan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Masing – masing elemen dari laporan keuangan dapat bertambah maupun berkurang.

2.12 Sistem Akuntansi Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

Dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2014, akuntansi pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lain - lain PAD yang sah. Adapun lain - lain PAD yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.13 Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan LO dan LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)
3. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
4. Surat Tanda Setoran (STS)
5. Bukti Transfer/Setor
6. Nota Kredit Bank
7. Bukti Memorial
8. Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya

2.14 Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta Pencatatannya

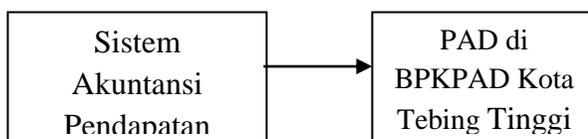
Selama tahun berjalan, Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan LRA)

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan pendapatan LO, yaitu:

- 1) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas
- 2) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas

2.15 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir penelitian digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga yang diteliti oleh dan kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis atau berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dikarenakan bersifat sementara, maka hipotesis dapat diterima jika dapat dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah: **“Belum Baik Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan terhadap PAD di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi”**.

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah di Bidang Pendapatan beralamat Jl. Gunung Agung No. 1 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber pihak – pihak lain di perusahaan, yang sudah diolah dan relevan dengan penelitian ini, seperti gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah, pergantian Dinas Pendapatan, dan Jabatan Fungsional serta informasi penerapan sistem akuntansi pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPKPAD.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Kepustakaan

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (trianggulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Akuntansi Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.

Pendapatan LRA di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menggunakan akuntansi berbasis kas (*cash based*)

accounting) yang merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Pendapatan LO di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menggunakan akuntansi berbasis akrual (*accrual based accounting*) yang merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pendapatan LRA diterapkan basis kas pada tahun yang diteliti tahun 2013 – 2016, padahal dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 SAP berbasis akrual sudah diterapkan yang mengakui pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Pendapatan LO baru diterapkan di BPKPAD pada tahun 2015 yang menggunakan basis akrual. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban

4.2 Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Terhadap PAD Kota Tebing Tinggi

Sistem akuntansi pendapatan terhadap PAD di BPKPAD Kota tebing Tinggi mempunyai beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP – Daerah)
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP – Daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menetapkan pajak daerah bagi wajib pajak.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR – Daerah)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR – Daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menetapkan pajak daerah bagi wajib retribusi. Berikut beberapa dokumen ketetapan dari jenis retribusi daerah.
3. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
Tanda bukti penerimaan merupakan catatan yang diselenggaraan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua bukti penerimaan.
4. Surat Tanda Setoran (STS)

Surat tanda setoran merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah untuk menyetor penerimaan daerah.

5. Bukti Transfer/ setor

Bendahara Penerima Kas menyetorkan seluruh pendapatan pajak/retribusi yang diterima bukti transfer ke bank.

6. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

7. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

8. Laporan Keuangan

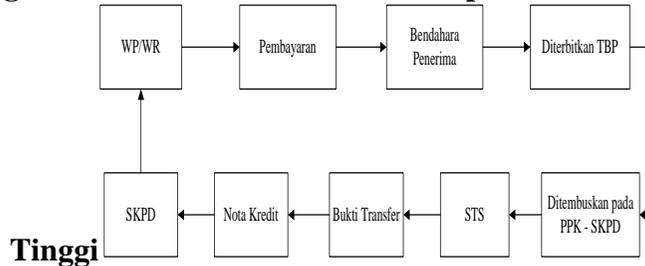
Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain.

4.3 Sistem Akuntansi Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi bagian bendahara penerimaan melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan pendapatan termasuk Pendapatan Asli Daerah melalui SIMDA. SIMDA merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi bekerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara dengan nota kesepahaman/Mou antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan BPKP Nomor 100/2835/Pomer/2012 dan Nomor 1193/PW 02/3/2012 tanggal 1 maret 2012 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah.

BPKPAD Kota Tebing Tinggi memakai SIMDA Keuangan dipakai tahun 2014. SIMDA menampilkan laporan keuangan yang berbasis kas menuju akrual pada tahun 2013, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada tahun 2015, BPKPAD menerapkan akuntansi berbasis kas dalam laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, tambahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bagan Alur Sistem Akuntansi Pendapatan Kota Tebing



Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	16.463.000.000,00	20.643.514.038,50	125,39
2	Retribusi Daerah	4.406.770.000,00	3.960.226.741,90	89,87
	Total PAD Tahun 2015	79.551.848.210,00	82.410.053.810,21	103,59

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	14.790.000.000,00	19.752.273.851,97	112,99
2	Retribusi Daerah	5.480.618.886,00	5.942.153.764,11	108,42
	Total PAD Tahun 2014	65.945.890.342,00	74.515.273.851,97	112,99

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	21.054.000.000,00	22.347.674.951,50	106,14
2	Retribusi Daerah	4.510.778.000,00	4.096.558.952,73	90,82
	Total PAD Tahun 2016	96.675.127.242,00	94.058.491.717,40	97,29

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	9.560.000.000,00	14.314.342.839,50	149,73
2	Retribusi Daerah	5.706.320.000,00	6.011.009.932,30	105,34
	Total PAD Tahun 2013	41.316.898.567,00	11.882.639.497,90	89,77

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada pajak daerah meningkat secara signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing dengan rata - rata 123,56 %. Pendapatan pajak daerah ini menunjukkan bahwa PAD dalam Pajak Daerah meningkat selama 4 tahun sehingga Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat mengelola potensi daerahnya dengan baik dan memanfaatkan potensial kekayaan semaksimal mungkin dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran pada retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2016 dengan rata - rata 98,61%.

Pada Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban – beban dikelompokkan menurut kalsifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, serta beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.

4.4 Belum Baik dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Dalam pengindentifikasian, pencatatan, maupun dalam pelaporan, Masih adanya terdapat kekurangsempurnaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atas semua penerimaan ke aplikasi SIMDA, yaitu: data tidak konkrit atau tidak jelas, Kesalahan entry sehingga harus membuat jurnal penyesuaian dan jurnal balik, terlambat menyampaikan data dari SKPD masing - masing, data tidak *update* dalam 24 jam sehingga terjadinya tidak balance atau tidak seimbang dalam pemasukan dan penerimaan dalam pencatatan dan pembukuan keterlambatan menyusun laporan keuangan di BPKPAD Kota Tebing Tinggi. Hal ini belum optimalnya koordinasi antar unit kerja, dan menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pendapatan yang diterapkan terhadap PAD di BPKPAD Kota Tebing Tinggi belum baik pada tahun 2013 – 2016 .

4.5 Upaya–Upaya Memperbaiki Kesalahan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan Terhadap PAD di Kota Tebing Tinggi

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pencatatan di SIMDA terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah kota Tebing Tinggi dan untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berikut beberapa upaya yang dilakukan BPKPAD dalam memperbaiki kesalahan pada pencatatan di SIMDA, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
 - a) Melakukan pelatihan kepada para pegawai
 - b) Melakukan studi banding
 - c) Melakukan outbond training.
2. Bidang Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengadaan komputer workstation dan server untuk mendukung sistem akuntansi Menyusun Sistem Akuntansi terdiri dari:
 - a) Identifikasi Prosedur Keuangan Daerah.
 - b) Menentukan pihak – pihak terkait.
 - c) Menentukan dokumen terkait.
 - d) Menentukan jurnal standar.
 - e) Menuangkannya dalam langkah teknis.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dapat disimpulkan bahwa Laporan pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam pencatatan serta pelaporan oleh Bendahara Penerimaan dijelaskan bahwa menurunnya efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi
2. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja, dan menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pendapatan yang diterapkan terhadap PAD di BPKPAD Kota Tebing Tinggi belum baik terdapat kekurangsempurnaan dalam pencatatan.

5.2 Saran

Agar pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan di kota Tebing Tinggi dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal, maka ada beberapa saran yang diberikan penulis untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi:

1. Memberi beberapa sistem informasi dalam prosedur akuntansi pendapatan, antara lain:
 - a) Informasi *touch screen*
 - b) Informasi Penelitian Lapangan.
2. Melakukan publikasi dan informasi melalui media massa
3. Menyediakan layanan informasi online yang bisa diakses selama 24 jam melalui internet

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahri Syahrul, 2016, *Pengantar Akuntansi: Berdasarkan Sak Etap dan IFRS*, Yogyakarta, Andi Offset
- [2] Bastian Indra, 2011, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- [3] Diana Anastasia dan Setiawati Lilis, 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta, Andi Offset
- [4] Erlina dkk, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*, Jakarta, Salemba Empat
- [5] Muindro Renyowijoyo, 2013, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- [6] Mulyadi, 2010, *Sistem Akuntansi*, Jakarta, Salemba Empat, PP.6 <http://eprints.polsri.ac.id/2500/3/BAB%20II.pdf>
- [7] Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Jenis Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta, Erlangga
- [8] Siregar Baldric, 2015, *Akuntansi Sektor Public*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. 2010
- [9] Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta
- [10] Sujarweni Wiratna, 2015, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- [11] Suwanda Dadang dan Santosa Hendri, 2014, *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- [12] TM Books, 2015, *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapan*, Yogyakarta, Andi Offset

- [13] Peraturan Daerah, 2011, *Pajak Daerah*, Tebing Tinggi. 5
- [14] Peraturan Daerah, 2011, *Retribusi Daerah*, Tebing Tinggi. 6
- [15] Peraturan Walikota Tebing Tinggi, 2017, *Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi*, Tebing Tinggi. 24
- [16] Peraturan Walikota Tebing Tinggi, 2014, *Sistem Akuntansi Pemerintah*, Tebing Tinggi. 39